

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 1 NOVEMBER - 10 JANUARI 2022
(Masa Sidang Mulai Tanggal 1 November – 16 Desember 2021
dan Masa Reses Mulai Tanggal 17 Desember 2021 – 10 Januari 2022)**

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 adalah sebagai berikut:

I. FUNGSI LEGISLASI

A. Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP)

1. Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 belum melanjutkan pembahasan RUU PDP dengan Pemerintah karena masih menunggu kesiapan Pemerintah untuk membahas pasal-pasal krusial dalam RUU PDP, diantaranya mengenai kelembagaan.
2. Selanjutnya Rapat Paripurna DPR RI ke-10 tanggal 7 Desember 2021 telah menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU PDP dengan Pemerintah untuk Masa Persidangan berikutnya.

B. Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran)

Dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyusunan RUU Penyiaran, Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke 3 (tiga) Provinsi yaitu:

1. Sumatera Utara (Medan)
2. Jawa Timur (Surabaya)
3. Bali

Dalam Kunjungan tersebut, Komisi I DPR RI mendapatkan masukan dari LPP TVRI, LPP RRI, Balmon, KPID, dan LPS Lokal diantaranya mengenai:

1. LPP TVRI dan LPP RRI
 - a. Persiapan LPP RRI dan LPP TVRI sebagai penyelenggara multiplexing di era digitalisasi Penyiaran.
 - b. Pendapat LPP RRI dan LPP TVRI terkait dengan penyiaran multiplatform bila terjadi di Indonesia dan cara mengaturnya.
 - c. Hal-hal yang telah dilakukan oleh LPP RRI dan LPP TVRI dalam menyelenggarakan penyiaran multiplatform.
 - d. Pendapat LPP RRI dan LPP TVRI agar pengaturan Penyiaran di Indonesia lebih

komprehensif dan menjangkau seluruh aspek kebutuhan masyarakat akan kegiatan penyiaran di Indonesia.

2. Balai Monitoring (Balmon) Kelas I
 - a. Kesiapan Balmon dalam mengawasi penggunaan frekuensi penyiaran di era digitalisasi penyiaran.
 - b. Penyesuaian kewenangan yang akan diberikan kepada Balmon dalam rangka pengawasan penggunaan frekuensi penyiaran pada penyelenggaraan penyiaran multiplatform.
 - c. Tantangan yang dihadapi Balmon dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan frekuensi penyiaran pada penyelenggaraan penyiaran multiplatform.
3. KPID
 - a. Persiapan KPID dalam menyongsong digitalisasi Penyiaran.
 - b. Pendapat KPID terkait dengan penyiaran multiplatform bila terjadi di Indonesia dan cara mengaturnya.
 - c. Pendapat KPID agar pengaturan Penyiaran di Indonesia lebih komprehensif dan menjangkau seluruh aspek kebutuhan masyarakat akan kegiatan penyiaran di Indonesia.
 - d. Optimalisasi hubungan kelembagaan dan sumber anggaran KPI dan KPID di era penyiaran digital.
 - e. Optimalisasi fungsi, tugas, wewenang dan hubungan kerja antara KPI dan KPID di era penyiaran digital.
4. LPS Lokal
 - a. Kondisi program siaran dan pengelolaan aset TV dan Radio Lokal saat ini.
 - b. Persiapan yang dilakukan TV dan Radio Lokal dalam rangka menghadapi era penyiaran digital.
 - c. Pola penyelenggaraan multipleksing yang ideal bagi TV dan Radio Lokal.
 - d. Pendapat LPS Lokal agar pengaturan Penyiaran di Indonesia lebih komprehensif dan menjangkau seluruh aspek kebutuhan masyarakat akan kegiatan penyiaran di Indonesia.

II. FUNGSI ANGGARAN

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, Komisi I DPR RI tidak melaksanakan Rapat Anggaran, karena tidak adanya penjadwalan Rapat Anggaran oleh Badan Anggaran DPR RI.

III. FUNGSI PENGAWASAN

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 Komisi I DPR RI telah melaksanakan kegiatan:

A. Pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI

1. Komisi I DPR RI telah mendapatkan penugasan dari Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 3 November 2021 untuk membahas Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI sebagaimana Surat dari Presiden RI, yaitu Surat Nomor: R-50/Pres/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan

- Panglima TNI dan hasil pembahasannya akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna terdekat tanpa melalui Rapat Bamus kembali.
2. Menindaklanjuti penugasan tersebut, Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 4 November 2021 telah memutuskan untuk melaksanakan:
 - a. Rapat Pimpinan dan Kapoksi dalam rangka verifikasi administrasi Calon Panglima TNI tanggal 5 November 2021.
 - b. RDP Komisi I DPR RI dengan Calon Panglima TNI dalam rangka pemberian persetujuan terhadap Calon Panglima TNI pada tanggal 6 November 2021.
 - c. Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 6 November 2021 dalam rangka pengambilan keputusan
 3. Selanjutnya Komisi I DPR RI telah menyampaikan Hasil Pembahasan tentang Pemberian Persetujuan terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 8 November 2021.

B. Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pengawasan

1. **Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala Siber dan Sandi Negara (BSSN)** pada tanggal 15 November 2021 dalam rangka membahas:
 - a. Permasalahan kebocoran data di Kementerian/Lembaga Pemerintah;
 - b. Proteksi keamanan data pribadi di dunia maya saat ini dan masa mendatang;
 - c. Penanganan ancaman siber untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi pada pasca pandemi Covid-19;
 - d. Proteksi ancaman *nation state* melalui perang siber (*Cyber Warfare*) dan terorisme siber (*Cyber Terrorism*);
 - e. Keamanan siber Indonesia di era Revolusi Industri 4.0; dan
 - f. Penanganan keamanan siber seiring penetrasi *cloud* meningkat.
2. **Raker dan RDP Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Dirut LPP TVRI** pada tanggal 16 November 2021 dalam rangka mendapatkan:
 - a. Penjelasan Menkominfo terkait dengan perkembangan persiapan pelaksanaan digitalisasi penyiaran (ASO);
 - b. Penjelasan Dirut LPP TVRI terkait dengan langkah-langkah persiapan LPP TVRI dalam pelaksanaan digitalisasi penyiaran.
3. **RDP Komisi I DPR RI dengan Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Anggota KIP Periode 2021-2025** pada tanggal 23 November 2021 dalam rangka mendengarkan penjelasan terkait rekrutmen calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025. Dalam RDP tersebut, Komisi I DPR RI memberikan catatan agar Pansel Calon Anggota KI Pusat Periode 2021-2025 untuk melakukan semua proses dalam pemilihan Anggota KI Pusat mulai dari proses administratif sampai kepada penetapan 21 (dua puluh satu) nama-nama calon tersebut, agar dapat dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif.

C. Panja Pengawasan

1. Pada MP II TS 2021-2022, Komisi I DPR RI telah menerima Laporan 2 (dua) Panja Pengawasan yang selanjutnya menjadi rekomendasi Komisi I DPR RI kepada Mitra Kerja Komisi I DPR RI yang terkait, yaitu:
 - a. **Panja Diplomasi Luar Negeri terkait Penanggulangan Covid-19, dengan rekomendasi sebagai berikut:**
 - 1) **Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri**

- a) Komisi I DPR RI mendorong Kemlu untuk terus meningkatkan penguatan kelembagaan dan pembangunan pusat data terintegrasi serta percepatan pendataan dan verifikasi data WNI di luar negeri guna peningkatan pelayanan publik dan perlindungan WNI di luar negeri, terutama PMI dan ABK.
- b) Komisi I DPR RI meminta Kemlu untuk memastikan pemenuhan perlindungan sosial, bantuan logistik, dan kebutuhan vaksin untuk WNI di luar negeri terutama kelompok kurang mampu dan rentan. Untuk itu, penting bagi Kemlu untuk melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya: akselerasi asesmen data dan pemetaan lapangan serta juknis pemberian bantuan bagi WNI di luar negeri dalam rangka penanganan Covid-19.

2) Diplomasi kesehatan Indonesia untuk kebutuhan vaksin dan ketahanan kesehatan nasional

- a) Komisi I DPR RI meminta Kemlu untuk terus meningkatkan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan evaluasi dengan pemangku kepentingan di dalam negeri dalam menjalin kolaborasi internasional, baik secara bilateral maupun multilateral terkait:
 - 1) Diplomasi dalam Penyediaan Vaksin Covid-19
 - 2) Diplomasi dalam Pengembangan Vaksin Covid-19 terutama dalam hal kolaborasi riset dan transfer teknologi;
 - 3) Diplomasi dalam Penyediaan Obat dan Alkes
 Ketiga hal di atas dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan Covid-19, memperkuat kapasitas dan kemandirian sistem kesehatan nasional serta menyukseskan program vaksinasi nasional.
- b) Komisi I DPR RI meminta Kemlu menjalin kerja sama internasional untuk terus menyuarkan pentingnya akses terhadap vaksin yang aman, tepat waktu dan terjangkau bagi semua negara. Selain itu, Kemlu perlu melakukan pendekatan secara berkesinambungan kepada WHO dan negara-negara dunia agar pengakuan terhadap vaksin merujuk pada *Emergency Use of Listing (EUL) WHO* dengan tujuan diskriminasi vaksin dihentikan.

3) Diplomasi Indonesia untuk mempercepat pemulihan ekonomi

- a) Komisi I DPR RI mendorong Kemlu terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi terintegrasi dengan kementerian/ lembaga terkait untuk mengakselerasi diplomasi ekonomi di tingkat global guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.
- b) Komisi I DPR RI mendorong Kemlu untuk melakukan kajian secara cermat atas kebijakan strategis diplomasi ekonomi, antara lain:
 - 1) Pembukaan Travel Corridor Arrangement (TCA) dengan negara-negara yang memiliki hubungan potensial di bidang ekonomi dan perdagangan
 - 2) Finalisasi travel bubble pariwisata
 - 3) Finalisasi dan implementasi perjanjian kemitraan komprehensif dengan negara-negara sahabat seperti I-EFTA dan IE-CEPA
 - 4) Pengembangan platform digital untuk peningkatan perdagangan dan investasi

- c) Komisi I DPR RI meminta Kemlu untuk mengawal *co-sponsorship* Indonesia dalam Proposal TRIPS Waiver WTO dengan menekankan permintaan pengabaian ketentuan tertentu, seperti HKI atau paten, rahasia dagang, dan desain industri yang sebelumnya diatur dalam Perjanjian TRIPS. Tujuannya adalah mempercepat penanganan, pencegahan, dan pengobatan Covid-19.

4) Anggaran

Komisi I DPR RI meminta Kemlu untuk terus melakukan penajaman program prioritas, optimalisasi anggaran serta koordinasi dengan K/L terkait, guna memfokuskan diplomasi Indonesia pada: perlindungan WNI, kesehatan, dan pemulihan ekonomi untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19.

b. Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid-19, dengan rekomendasi sebagai berikut:

1) Pembangunan Infrastruktur TIK Pendukung Internet

- a) Komisi I DPR RI mendukung Kemkominfo lu untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung penyediaan akses internet.
- b) Komisi I DPR RI mendorong Kemkominfo agar pembangunan infrastruktur TIK merata yang mencakup seluruh wilayah Indonesia
- c) Komisi I DPR RI meminta operator untuk berperan serta dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di berbagai wilayah *blank spot*.

2) Program Akses Internet yang merata baik di 3T atau wilayah yang masih *blank spot*

Komisi I DPR RI meminta kepada Kemkominfo untuk secara berkesinambungan membuat program strategis terkait penyediaan akses internet untuk berbagai keperluan baik pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, ecommerce, dll. Di masa pandemi, internet menjadi sarana strategis untuk mendukung pendidikan media daring dan *e-commerce*.

3) Koordinasi dengan Para Operator Telekomunikasi

Komisi I DPR RI mendorong koordinasi sinergis antara Kemkominfo dengan para operator telekomunikasi terkait pembangunan infrastruktur TIK maupun kolaborasi program penyediaan akses internet di berbagai daerah yang membutuhkan.

4) Anggaran

Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk mengalokasikan kebutuhan anggaran yang memadai di TA 2022 agar titik penyediaan akses internet bertambah guna mengantisipasi kemungkinan pandemi yang terus berlanjut.

- 2. Komisi I DPR RI berdasarkan keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 24 November 2021 memutuskan untuk membentuk 2 (dua) Panja Pengawasan, yaitu:
 - a. Panja Digitalisasi Penyiaran; dan
 - b. Panja Penyediaan Akses Internet.

D. Kunjungan Kerja

1. Kunker Spesifik Komisi I DPR RI

Disamping melaksanakan Rapat-rapat bersama Mitra Kerja Komisi I DPR RI, untuk mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi I DPR RI, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi :

- a. Jawa Barat (Bandung) dalam rangka:
 - 1) mengetahui sejauhmana upaya Binda Jabar dalam melakukan pencegahan dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 dan mendukung pelaksanaan program vaksinasi di Jawa Barat oleh Sub Gugus Tugas melalui Tim Medical Intelligent BIN yang akan melakukan vaksinasi massal secara *door to door* kepada para pelajar dan masyarakat yang berada di wilayah Jawa Barat (Jabar);
 - 2) langkah-langkah yang diambil oleh Binda Jabar dalam mendistribusikan vaksin kepada para pelajar dan masyarakat di daerah Jabar dan cara melakukan sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat Jabar agar bersedia menerima vaksinasi
 - 3) langkah-langkah yang diambil oleh Binda Jabar untuk melakukan pengamanan distribusi vaksin dan hal yang menjadi tantangan dan hambatan di lapangan.
- b. Kepulauan Riau (Batam) dalam rangka mendapatkan penjelasan Kepala Balai Deteksi Sinyal (BDS) Batam mengenai pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis informasi, dan diseminasi hasil analisis tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- c. Kalimantan Selatan dalam rangka mengetahui:
 - 1) Dukungan Binda untuk percepatan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Selatan
 - 2) Deteksi dini dampak Covid-19 terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankamnas di Provinsi Kalimantan Selatan
 - 3) Deteksi dini pembakaran liar dan/atau penerbangan liar (*illegal logging*) Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - 4) Deteksi dini dampak, peluang, dan tantangan Provinsi Kalimantan Selatan atas rencana perpindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur
- d. Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mengetahui:
 - 1) Dukungan Binda untuk percepatan vaksinasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2) Deteksi dini potensi konflik yang mengancam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sara, terorisme, dan radikalisme;
 - 3) Deteksi dini transformasi ekonomi dari berbasis pertambangan ke pariwisata, hilirasi timah dan mineral, serta degradasi lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 4) Deteksi dini aktivitas pertambangan illegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- e. Sulawesi Utara dalam rangka mengetahui sejauhmana upaya Binda Sulut dalam melakukan serbuan vaksinasi Virus Covid-19 terhadap masyarakat Sulut serta

untuk mendapatkan penjelasan mengenai program *door to door* vaksinasi massal bagi pelajar dan masyarakat, serta cara pengamanan distribusi vaksin, memberikan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia untuk melakukan vaksinasi, serta hambatan yang dialami dalam proses serbuan vaksinasi terhadap seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.

- f. Jawa Barat (Bandung) dalam rangka mengetahui langkah-langkah persiapan LPP TVRI dalam pelaksanaan ASO.



- g. Jawa Barat (Bogor) dalam rangka mendapatkan penjelasan dari Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) terkait dengan:
- 1) Korelasi implementasi tri dharma Perguruan terhadap Siber dan Sandi Negara;
 - 2) Peluang dan tantangan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka; dan
 - 3) Sinergitas Poltek SSN dengan Kementerian/Lembaga, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

2. Kunker Luar Negeri

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi I DPR RI terkait pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan serta untuk mengetahui pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia serta Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri, Komisi I DPR RI pada MP II TS 2021-2022 telah melaksanakan Kunker ke:

- a. Uni Emirat Arab (Dubai)



- b. Turki (Istanbul)



c. Bosnia and Herzegovina



3. **Kunker Reses**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi I DPR RI di daerah, pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, Komisi I DPR RI melaksanakan Kunker ke Provinsi:

a. Sumatera Selatan



b. Sumatera Barat



c. Nusa Tenggara Barat (NTB)



IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

Jakarta, 22 Desember 2021
KABAGSET. KOMISI I DPR RI,

SARTOMO, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001